

PERSPEKTIF ADMINISTRASI PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MENUJU TINGGAL LANDAS

oleh

Dr. H. Chatlinas Said

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TGL. :	30 JUL 1997
SUMBER / HARGA :	H 1
KOLEKSI :	K
NO. INVENTARIS :	1455/K/97-Pr(2)
KLASIFIKASI :	371.295A1 70

Jurusan Administrasi Pendidikan
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
IKIP PADANG

1987

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

PERSPEKTIF ADMINISTRASI PENDIDIKAN
DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MENUJU TINGGAL LANDAS

oleh
Chatlinas Said

Pendahuluan

Esensi pembangunan Nasional ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.¹ Karena itu pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Nasional. Dengan pembangunan pendidikan dibangun insan-insan yang dapat membangun dirinya sendiri dan sekali gus dapat berperan dalam pembangunan bangsanya.²

Seirama dengan pembangunan Nasional, pembangunan pendidikan telah melewati tiga fase: pelita pertama, kedua dan ketiga. Dewasa ini perjalanannya tengah mengikuti fase pelita keempat. Diharapkan pada gilirannya pembangunan pendidikan ini akan memasuki periode yang dikenal dengan jenjang tinggal landas.

Kapan jenjang tinggal landas itu akan ditingkat adalah suatu masalah. Persyaratan-persyaratan apa yang perlu dipenuhi sebelum sampai ke sana adalah masalah lain. Kemudian bagaimana posisi administrasi pendidikan dalam menghantarkan pembangunan pendidikan ke tujuan tersebut

adalah masalah yang berkaitan dengan kedua masalah sebelumnya. Tulisan ini mencoba melihat aspek-aspek yang dipertanyakan.

Tingkat Tinggal Landas

Ungkapan tinggal landas mengingatkan pendengarnya akan suatu peristiwa di bandar udara. Setelah melaju selama waktu tertentu, sebuah pesawat terbang tiba-tiba menengadahkan kepalanya. Sekejap rodanya terangkat dan tiada lagi berjejak di bumi. Derumannya semakin meninggi mengikuti terobosannya yang semakin memuncak. Pada gilirannya terbangnya mulai mendatar, tenang dan terus dengan segala kemantapannya menuju ... entah ke mana.

Dikatakan bahwa pembangunan pendidikan juga akan sampai pada tahap tinggal landas. Ini seolah-olah memberi isyarat adanya persamaan pesawat terbang dengan pembangunan pendidikan. Memang pembangunan pendidikan itu dapat secara hipotetis digambarkan sebagai sesuatu yang bergerak. Gerakannya mulai dari tahap keberangkatan akan melewati fase-fase tertentu. Fase tinggal landas adalah salah satu dari tingkatan yang akan dilewatinya.

Teori tahapan pembangunan yang diperkenalkan Rostow membenarkan sangkaan di atas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi berkembang mengikuti lima fase perkembangan. Fase pertama bermula dari pertumbuhan ekonomi yang terlihat pada masyarakat tradisional. Kemudian, dengan adanya kesadaran untuk memperbaiki diri, masyarakat tersebut

tersebut
MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

benah diri, berusaha meninggalkan sifat ketradisional-annya. Kegiatannya ditujukan untuk mempersiapkan diri bagi tahap berikutnya. Rostow menamakan periode ini dengan tahap prakondisi tinggal landas. Bila persyaratan-persyaratan telah memungkinkan, periode prakondisi ini ditinggalkan. Perekonomian masyarakat ini dikatakan sudah berkembang tanpa menggantungkan pertolongan pada pihak lain. Dengan bekal yang terkumpul selama periode sebelumnya ditambah dengan keyakinan untuk mampu terbang sendiri, maka masyarakat yang diperkatakan mulai mengambil ancang-ancang dan pada gilirannya membuka sayapnya. Rodanya yang selama ini mengelinding di bumi, sekarang diangkat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat itu mulai dengan era baru: tinggal landas.³ Dikatakan bahwa kemampuan masyarakat untuk menginvestasikan asetnya sebanyak sekurang-kurangnya sepuluh persen setahun dipakai sebagai ukuran. Dalam masyarakat yang demikian telah berlangsung proses perubahan struktur yang mendasar di bidang sosial dan politik.⁴

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi pada tahap tinggal landas memegang kunci yang sangat penting untuk dapat memasuki gerbang tahap berikutnya. Pada tahap ini pertumbuhan perkonomian benar-benar telah mantap. Rostow menyebutnya dengan ungkapan tingkat kematangan atau kedewasaan. Hanya dengan terpenuhinya kondisi kematangan atau kedewasaan inilah baru masyarakat itu dengan selamat sen-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IRIP PADANG

tosa pada puncak menara cita: tujuan akhir dari pembangunan. Periode ini antara lain ditandai oleh kondisi perekonomian yang dinikmati secara konsumtif oleh manusia secara massal.⁵

Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Pendidikan

Dalam laporannya tentang dekade pembangunan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), U Than, Sekretaris Jenderal, melihat pembangunan itu sebagai suatu pertumbuhan dengan perubahan. Perubahan yang dimaksud bertalian dengan aspek-aspek sosial dan kultural.⁶ Ditinjau dari segi ekonomi, Goulet mengartikan pembangunan itu sebagai suatu usaha memerdekakan manusia dari lingkungan alam keterbelakangan ekonomi. Dengan bantuan lembaga-lembaga teknologi, manusia dimerdekakan dari segala bentuk kehidupan yang tidak berkeprimanusiaan.⁷ Para ahli ekonomi membenarkan bahwa pembangunan adalah kata yang berpadanan dengan kata pertumbuhan ekonomi. Kadar pembangunan itu diukur dengan penambahan tahunan pendapatan nasional per kapita.⁸

Pertumbuhan ekonomi dilihat sebagai dewi penyelamat oleh negara-negara yang sedang berkembang. Mereka berkeyakinan bahwa kehidupan yang layak hanya bisa dicapai melalui pendapatan nasional yang tinggi. Atas dasar inilah mereka berusaha keras meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di negaranya.

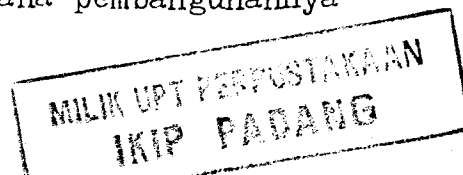
Dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjangnya, Indonesia juga bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kese-

jateraan seluruh rakyat.⁹ Untuk itu pembangunan bidang ekonomi dijadikan sasaran utama. Pembangunan bidang-bidang lain hanya bersifat pelengkap. Sebagai pelengkap kegiatan pembangunan di bidang ini diarahkan untuk menunjang pembangunan ekonomi.¹⁰ Dijelaskan selanjutnya bahwa pembangunan bidang-bidang lainnya itu harus mengikuti kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh bidang ekonomi.¹¹

Kedudukan pembangunan pendidikan tampaknya belum begitu jelas. Dikatakan demikian karena dalam rangka pembangunan nasional pendidikan tidak lebih dari unsur penunjang bidang ekonomi. Sejauh yang dapat diamati, pola umum pembangunan jangka panjang belum menggariskan kerangka kebijaksanaan pembangunan pendidikan. Agaknya satu kata pun tidak menyinggung masalah itu.¹²

Pembangunan pendidikan sampai pelita keempat ini ternyata masih bersifat sambilan, kalau boleh dapat dikatakan demikian. Dalam REPELITA IV baru disebut-sebut program pengembangan sistem pendidikan. Program ini baru bertujuan untuk mengadakan langkah permulaan dalam menetapkan kerangka kebijaksanaan, strategi dan perencanaan pembangunan pendidikan. Untuk itu diadakan usaha-usaha yang meliputi:

1. Pemikiran dan penelitian mengenai sistem pendidikan dan sistem kebudayaan yang diperlukan bagi perumusan kebijaksanaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan agar pembangunan pendidikan dan pengembangan kebudayaan dapat diselenggarakan dengan hasil yang sebaik-baiknya.
2. Pengembangan kebijaksanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan agar usaha pembangunannya



dapat disesuaikan dengan rencana, yaitu sistem pendidikan dengan memperhatikan tuntutan dan dampak perkembangan ekonomi, sains, teknologi, sosial dan kebudayaan.

3. Pengembangan suatu sistem informasi yang terpusat dengan menggunakan teknologi mutakhir tentang pendidikan dan kebudayaan yang diperlukan bagi perencanaan dan perumusan kebijaksanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta yang sekali gus meningkatkan penyediaan informasi¹³ untuk menunjang pembangunan nasional umumnya.

Keterangan di atas memberi isyarat bahwa selama tiga pelita yang lalu, pembangunan pendidikan yang sesungguhnya belum ada. Kalaupun ada, kegiatannya hanya baru bersifat membantu pembangunan ekonomi. Dari bantuan ini diharapkan akan diperoleh dampaknya bagi pembangunan pendidikan sesungguhnya. Selama ini usaha pembangunan pendidikan baru dalam taraf pembinaan lingkungan, arena di mana pembangunan itu akan beroperasi. Dalam Pelita IV kegiatan mulai dialihkan pada pengumpulan masukan-masukan untuk dijadikan sebagai bahan kegiatan selanjutnya. Barulah setelah pemikiran-pemikiran diaduk dan kemudian dikembangkan menjadi landasan pengembangan kebijaksanaan kegiatan ditingkatkan pada perencanaan pembangunan pendidikan yang sesungguhnya.

Agaknya karena berpijak pada pegangan yang tidak utuh, maka selama ini penyelenggaraan pendidikan banyak bersifat tambal sulam. Masalah-masalah yang timbul diatasi secara insidental. Ini dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bukan bersumber dari aturan permainan yang telah disepakati bersama.

Aturan permainan itu, yakni undang-undang pokok kependidikan yang mengatur perusahaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional, masih dalam penggarapan. Perlu diketahui bahwa keharusan adanya undang-undang itu telah diingatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 empat puluh enam tahun yang lewat.¹⁴

Perencanaan Pendidikan Nasional

Di atas sudah diungkapkan bahwa apa yang dinamakan dengan pembangunan pendidikan selama tiga pelita, atau empat dengan pelita yang sekarang, pada hakikatnya baru merupakan prapembangunan pendidikan, kalau dapat dikatakan demikian. Tanpa mengecilkan arti dan hasil-hasil yang didapat dari pembangunan awal ini, disimpulkan bahwa pembangunan pendidikan yang sesungguhnya itu masih perlu direncanakan secara konseptual. Untuk itu tuntutan yang paling mendasar ialah adanya redefinisi dan reorientasi hakikat pembangunan pendidikan itu.

Perencanaan pendidikan yang sesungguhnya tampaknya baru akan menjadi acara pada pelita-pelita berikutnya. Acara ini merupakan pembangunan pendidikan yang mendasar. Fungsinya tidak lagi semata-mata merawat yang tidak beres, tetapi lebih dari itu akan meletakkan fundasi yang kokoh dan dapat

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama.

Perencanaan pendidikan adalah unsur pertama dan utama dalam kerangka pembangunan pendidikan. Unsur-unsur lainnya ialah implementasi dan evaluasi pelaksanaannya. Ketiga unsur itu merupakan subsistem-subsistem dari pembangunan pendidikan sebagai proses. Dengan demikian ketiganya saling isi-mengisi untuk tercapainya tujuan.

Konsep perencanaan pendidikan sebagai suatu sistem telah berkembang sebagai akibat banyaknya perubahan penting yang terjadi, baik di luar organisasi pendidikan itu atau di dalam kegiatan internalnya.¹⁵ Lembaga-lembaga pendidikan tidak dapat tidak harus mempersiapkan dirinya menerima perubahan-perubahan yang terjadi itu. Dunia yang dinamis ini dipenuhi oleh kemauan-kemauan politik, ekonomi, sosial, etika, dan moral yang kesemuanya itu ikut mempercepat terjadinya perubahan. Kenyataannya, memang keberhasilannya yang berlanjut biasanya menuntut adanya penyesuaian (adaptasi) dan pembaruan (inovasi).¹⁶

Teknologi yang maju dengan pesatnya juga menuntut perlunya perencanaan pendidikan. Sekolah-sekolah yang tidak mengikuti perkembangannya dengan menyesuaikan dirinya seperlunya akan ditinggalkan oleh kemajuan. Selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan yang tidak me-

nyadari perubahan-perubahan teknologi yang mungkin muncul pada beberapa tahun yang akan datang akan berada pada posisi yang merugikan dirinya sendiri.¹⁷

Tanpa memberikan rincian perubahan-perubahan yang terjadi, sekurang-kurangnya terdapat lima faktor yang masih relevan yang merupakan tantangan bagi perencanaan pendidikan nasional. Pertama, ledakan murid. Ledakan ini pada mulanya karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan hasil-hasil pendidikan. Tetapi kemudian, yang memberikan ledakan yang lebih hebat, peningkatan jumlah anak usia sekolah yang melebihi dari yang sudah-sudah. Ini sebagai akibat ledakan penduduk semenjak kemerdekaan. Di Indonesia, walaupun proyek keluarga berencana di negara ini dianggap yang paling berhasil di dunia, pertumbuhan penduduk tetap cukup besar (rata-rata 2,34% per tahun).

Kedua, semakin menipisnya sumber-sumber dana. Walaupun anggaran pendidikan telah diusahakan naik dari tahun-tahun sebelumnya, namun karena pertambahan itu tidak seimbang dengan ledakan murid, maka kemampuan dana itu semakin terasa kurang efektif. Tambahan pula adanya inflasi, resesi dan devaluasi cukup mengurangi keberartian dana yang tersisa.

Ketiga, meningkatnya dana/biaya yang diperlukan. Tantangan yang ditimbulkan oleh menurunnya nilai dana pend-

dikan diperkuat lagi oleh biaya per murid yang semakin meningkat.

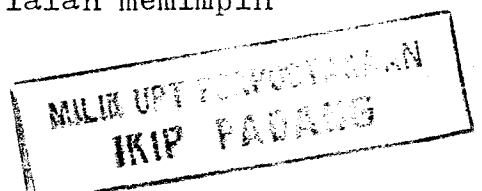
Keempat, semakin banyaknya murid putus sekolah dan tidak mendapat pekerjaan setelah tamat sekolahnya. Pada akhir Pelita III, tercatat sebanyak 4.980.000 penganggur (7½% dari jumlah angkatan kerja), pada akhir Pelita IV penganggur itu diperkirakan akan meningkat menjadi 7,95 juta (10,11%), dan diperkirakan pula nanti pada akhir Pelita V jumlah penganggur bertambah lagi menjadi 11,43 juta (12,37%).¹⁸

Kelima, kelambanan-kelambanan dan ketidakefisien-sian. Keempat situasi pendidikan yang diterakan di atas menyebabkan administrasi pendidikan tidak lancar. Dalam menghadapi situasi seperti itu, segala-galanya kelihattannya berjalan seperti biasa. Tidak ada pembaruan dan tidak ada pula perusakan. Pendekatan yang dikatakan oleh Coombs sebagai business-as-usual approach itu, ternyata berakibat lebih buruk lagi, menghasilkan worse-than-usual, lebih buruk dari yang biasa.¹⁹ Kurikulum, silabus, peningkatan guru, pengelolaan pengajaran, dan lain-lain penentu keberhasilan pendidikan dirasakan semakin tidak sesuai dengan perubahan lingkungan.

Peranan Administrasi Pendidikan

Para ahli umumnya sepakat mengatakan bahwa pengertian/ditujukan pada proses. Dalam proses itu terlibat sekalian anggota organisasi. Tugasnya ialah memimpin

administrasi.



dan mengawasi kegiatan-kegiatan anggota-anggota organisasi itu. Orang-orang yang secara resmi diserahi tugas yang berhubungan dengan jabatan-jabatan administrasi disebut administrator.²⁰

Proses administratif yang berkenaan dengan pendidikan disebut administrasi pendidikan. Dalam proses itu terlibat sejumlah manusia, di bawah sepuluh, belasan, atau bahkan ratusan tergantung besar kecilnya organisasi yang menghimpun anggotanya itu. Proses administratif di sekolah dasar, misalnya, melibatkan kepala sekolah, guru-guru, pesuruh, dan murid-murid. Kepala sekolah yang diserahi tugas memimpin dan mengawasi kegiatan guru-guru dan pesuruh termasuk ke dalam kelompok administrator.

Dalam skala yang lebih luas proses administratif ditemukan dalam organisasi pendidikan yang menjalankan tugas-tugas administratif yang lebih luas dan rumit dibandingkan dengan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Demikianlah proses itu dapat dilihat mulai dari kantor-kantor yang mengurus pendidikan di kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi, sampai ke departemen yang paling puncak, di pusat.

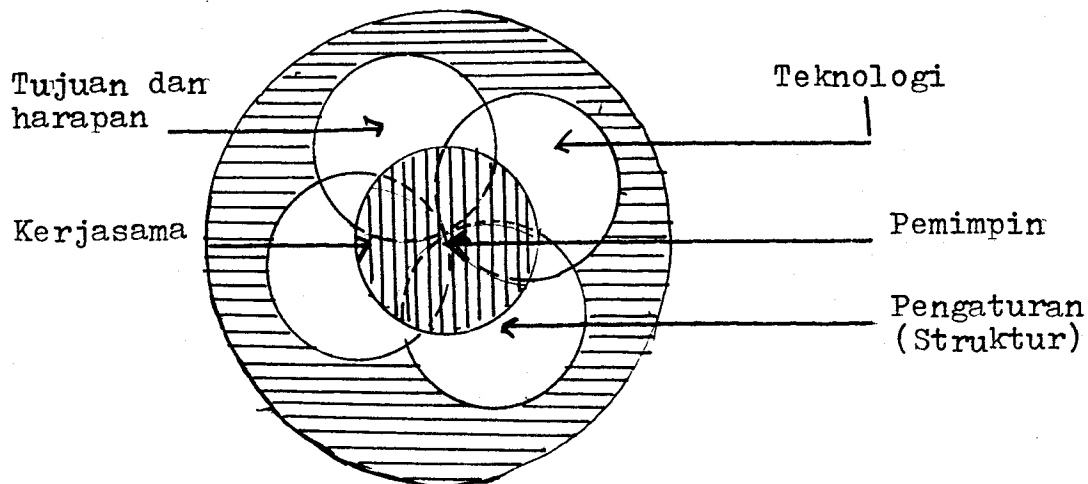
Pembangunan pendidikan tidak lain dari suatu proses administratif yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Di dalam proses ini terdapat subproses-subproses, mulai dari proses perencanaan pendidikan, pro-

ses pelaksanaan pendidikan dan proses evaluasi pendidikan. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari administrasi pendidikan.

Masalahnya sekarang ialah seberapa jauh administrasi pendidikan itu berperan dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan melihat posisi fungsi administrasi itu dalam organisasi pendidikan. Sehubungan dengan itu perlu diidentifikasi lebih dahulu esensi sebuah organisasi.

Organisasi, seperti yang dilihat oleh Pfiffner dan Sherwood, merupakan format yang penuh dengan saluran-saluran yang menuju ke suatu muara tujuan. Dalam saluran yang beraneka ragam banyaknya itu terdapat manusia-manusia yang bergerak menuju muara. Tugas-tugas yang mereka lakukan sangat bervariasi, namun terdapat hubungan antara satu dengan lainnya.²¹ Secara konseptual dapat dijelaskan bahwa dalam organisasi itu terdapat lima komponen yakni (1) tujuan dan harapan yang akan dicapai, (2) pengetahuan dan peralatan yang dipakai untuk mencapai tujuan, (3) kerjasama antara manusia, (4) aturan-aturan bekerja, dan (5) pimpinan. Kelima komponen ini saling berhubungan dan berkaitan. Seberapa jauh erat-eratnya hubungan antara komponen-komponen itu tergantung pada peran yang dimainkan oleh pimpinan. Gambar

berikut diharapkan akan dapat memperjelas organisasi dengan komponen-komponen tersebut ²²



Gambar memperlihatkan posisi masing-masing komponen. Masing-masing berhubungan dengan yang lainnya. Namun, pemimpin menempati posisi sentral.

Dalam organisasi pendidikan peranan pemimpin, dalam hal ini disebut administrator, jelas menempati tempat yang sangat menentukan.²³ Pengalaman-pengalaman di beberapa negara lain telah ikut mendukung kebenaran ini. Ditemukan bahwa kegagalan pembangunan pendidikan di negara-negara tersebut terutama akibat kurang mampunya manusia-manusia yang dipercayakan memimpin proyek-proyek. Bahkan ditegaskan bahwa rencana yang telah disusun dengan teliti dan teknik yang baik tidak akan memberikan hasil yang diinginkan selagi aparat administrasinya tidak memahami sepenuhnya tugas yang dipercayakan kepadanya.²⁴ Sehubungan dengan ini direkomendasikan supaya memberikan prioritas lebih dahulu pada reorganisasi dan penguatan administrasi sebelum rencana dija-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

lankan. "Revolusi dalam pendidikan harus dimulai dengan manajemen pendidikan," tulis Coombs.²⁵

Perspektif Administrasi Pendidikan

Di atas telah dijelaskan bahwa pembangunan pendidikan nasional sedang menuju pada penyusunan undang-undang pokok pendidikan. Di atas undang-undang pokok itu kelak akan disusun perencanaan pembangunan yang komprehensif. Dalam perjalanannya pada gulirannya nanti akan sampai pada tahap tinggal landas, mengikuti pembangunan ekonomi.

Tugas-tugas pembangunan akan terasa lebih kompleks. Bobotnya sudah barang tentu akan lebih berat dari yang sudah-sudah. Tantangan-tantangan, seperti sebagiannya telah dikemukakan sebelumnya, memerlukan suatu kerangka kerja yang lebih sistematis di atas pemikiran-pemikiran yang konseptual. Untuk itu peranan administrasi pendidikan perlu disempurnakan dan ditingkatkan.

Peranan administrasi pendidikan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang disebutkan itu dalam banyak hal, seperti telah dikelaskan di atas, terletak di tangan administrator-administrator yang akan mengendalikannya. Yang perlu dipertanyakan ialah (1) apakah dengan kondisi administrator-administrator yang ada sekarang tugas-tugas berat masa depan akan dapat di-

selesaikan dengan efektif dan efisien? Apakah mereka telah memiliki orientasi yang baik tentang tugas administratif? Apakah mereka benar-benar memahami konsep dan alat analisis yang memadai untuk merancang hari depan yang penuh dengan tantangan-tantangan itu? Apakah mereka telah benar-benar siap dengan kemampuan manajerial untuk dapat memahami dan menafsirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan yang telah dirumuskan di tingkat atas? Apakah mereka telah menyadari pentingnya inovasi di bidang pendidikan dan apakah mereka telah siap untuk melaksanakannya? Keseluruhan pertanyaan itu dengan kata lain disimpulkan: Apakah administrator-administrator yang diperlukan sudah terjamin kadar profesionalisasinya?

Selama ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah merintis pembentukan kader-kader administrator pendidikan melalui dua jalur. Jalur pertama dengan mengadakan penataran-penataran yang diikuti oleh administrator-administrator yang baru diangkat. Jalur lainnya dengan membuka jurusan administrasi pendidikan pada beberapa IKIP, termasuk di antaranya IKIP Padang sendiri.

Untuk menciptakan administrator-administrator pendidikan yang benar-benar profesional tentu perlu dipertimbangkan pengintensifan dan pengekstensifan jalur kedua. Kemampuan jalur pertama diperkirakan hanya

menjangkau kebutuhan-kebutuhan insidental dan mendesak. Dari administrator-administrator ini diperoleh kesan keterbatasan kemampuan mereka dalam menciptakan proses penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Secara umum disimpulkan bahwa terdapat perencanaan yang lemah, koordinasi dan komunikasi yang tidak mantap dan tersendat-sendat, baik vertikal atau horizontal. Sistem sekolahnya tampaknya dijalankan berdasarkan surat-surat keputusan dan instruksi-instruksi dari atasan. Atasan tidak begitu menyadari apakah instruksi-instruksi tersebut dapat dipahami oleh aparat pelaksana di bawah atau tidak. Ini memperlihatkan bahwa aparat tersebut dalam banyak hal hanya berbuat sesuai dengan instruksi yang diturunkan. Cara yang demikian tentu saja kurang membukakan jalan bagi mereka untuk berinisiatif. Pernah diungkapkan oleh team Proyek Penilaian Nasional Pendidikan bahwa keadaan sistem pendidikan sekarang ini pada umumnya hanya mampu untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin. Dikatakan bahwa aparat-aparat yang ada sekarang sudah jauh ketinggalan pengetahuannya untuk diharapkan mampu memahami hakikat pembaharuan pendidikan.²⁶

Jika gambaran administrator pendidikan di atas memang keadaannya demikian, maka agaknya dapat disimpulkan bahwa harapan akan berhasilnya pembangunan pendidikan yang kini tengah menuju tinggal landas akan mendapat

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

1455/K/97-P (2)

17

KI
3/10/29
SM
Rd

hambatan yang kuat. Karena itu perlu dipersiapkan sedini mungkin sebanyak-banyaknya kader-kader administrator yang benar-benar profesional.

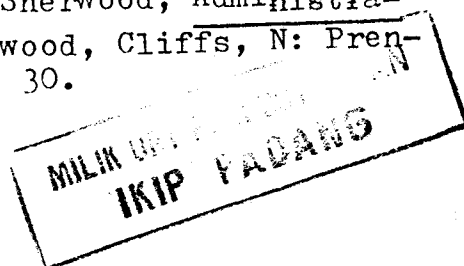
Kesimpulan

Pembangunan pendidikan yang telah berjalan beberapa pelita baru bersifat pelengkap pembangunan ekonomi. Sebagai pelengkap program-program yang telah dilakukan hanya ditujukan untuk penunjang program-program peningkatan kemampuan perekonomian negara. Pembangunan pendidikan yang sesungguhnya memerlukan suatu perencanaan yang komprehensif. Tujuannya akan lebih menjangkau segi-segi yang lebih luas di luar pembangunan ekonomi.

Pembangunan pendidikan pada tingkat tinggal landas memerlukan perombakan-perombakan yang mendasar. Untuk itu peranan administrator pendidikan sangat menentukan sekali. Dengan mengandalkan kemampuan administrator yang ada dikhawatirkan pembangunan pendidikan dengan berbagai pembaharuan tidak akan mencapai sasarnya. Karena itu perlu dipikirkan secara sungguh-sungguh perencanaan pembinaan kader-kader administrator pendidikan yang benar-benar profesional.

REFERENSI

1. Departemen P dan K, Bahan Penataran dan Referensi Penataran, 1983. h. 89
2. _____, Repelita IV. h. 509
3. Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978). h. 106
4. Oteng Sutisna, Pendidikan dan Pembangunan (Jakarta: Peberbit Ganaco NV, 1977). h. 4
5. Todaro, loc.cit
6. U. Than dalam Oteng, op. cit. h. 7
7. Denis Goulet, "Pembangunan dan Pembebasan", dalam Perisma No.3 Th. 2, Juni 1973, h. 79
8. Oteng, op. cit. h. 4
9. Departemen P dan K. Bahan Penataran dan Referensi, h. 96.
10. _____ Ibid. h. 97
11. Departemen P dan K. Repelita IV. h. 586
12. _____ Bahan Penataran dan Referensi Penataran, h.95
13. _____ Pelita IV. loc. cit.
14. David I. Cleland and William R. King, System Analysis and Project Management (Tokyo: McGraw-Hill, 1973) h. 28.
15. Richard A. Johnson, The Theory and Management of the System (Tokyo: McGraw-Hill, 1973). h. 28
16. Neil W. Chamberlain, Enterprise and Environment (New York: McGraw-Hill Book Company, 1986), h. 143
17. Peter F. Drucker, Technology, Management and Society (New York: Harper and Row Publisher, 1970)
18. "Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan", Management, No. 16 Th. III Mei-Juni 1983. h.47.
19. Philip H. Coombs, The World Education Crisis (New York: Oxford University Press, 1970), h. 164-166
20. Daniel E. Griffiths, "Administration: Theory and Change in Organization." Mike M. Milstein and James A. Belasco, Educational Administration and the Behavioral Sciences (ed.) Boston: Allyn and Bacon, Inc. 1973, h. 161
21. Jogn M. Ffiffner and Frank P. Sherwood, Administrative Organization (Englewood, Cliffs, N: Prentice Hall Inc., 1960), h. 30.



22. Adaptasi dari Richard A. Johnson, op. cit. h. 43
23. Oteng, op. cit. h. 9
24. _____, Ibid.
25. Coombs, op. cit. h. 121
26. Laporan Team Kunjungan PPNP, Code No. LU-04. 2-1971
(Jakarta: PPNP-BPP Dep. P & K, 1971) h. 4.